

## **BAB IV**

### **FAKTOR EKSTERNAL YANG MENDORONG INGGRIS KELUAR DARI UNI EROPA**

Pada bab empat ini penulis akan menjelaskan hubungan Inggris dengan Uni Eropa dalam konteks internasional dengan membahas beberapa kebijakan Uni Eropa yang merugikan Inggris. Bab ini akan menjelaskan beberapa kebijakan ekonomi politik Uni Eropa yang merugikan Inggris. tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, kaitannya dengan negara negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan ekonomi politik antara negara tersebut dengan negara lain<sup>1</sup>. Dalam merumuskan suatu keputusan luar negeri, suatu negara akan menimbang hubungan negara tersebut dengan situasi lingkungan internasionalnya terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan luar negeri yang dihasilkan merupakan respon dari situasi lingkungan internasional negara tersebut. Situasi tersebut dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan konteks geografis, ekonomi dan politis..<sup>2</sup>

#### **Beberapa Kebijakan Uni Eropa yang Merugikan Inggris**

Hubungan Inggris dengan Uni Eropa tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat dinamika hubungan yang terjadi antara Inggris dengan Uni Eropa.

---

<sup>1</sup>William D.Coplin.,*Loc.Cit.*

<sup>2</sup>*Ibid.*

Beberapa tindakan atau kebijakan Uni Eropa terkadang tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah ;

#### 1. European Monetary Union

European Monetary Union adalah kebijakan ekonomi bersama dan aturan bagi negara anggota untuk menggunakan mata uang tunggal (Euro) yang dipakai oleh seluruh negara anggota. European Monetary Union merupakan bagian dari European Economic and Monetary Union yang diuncurkan pada tahun 1992. Kebijakan ini pada awalnya merupakan kebijakan ekonomi dan fiskal, kebijakan moneter secara umum yang mengikat semua anggota Uni Eropa. Diawali dengan keputusan untuk membentuk Economic and Monetary Union oleh Dewan Eropa pada perjanjian Maastricht. Tujuan dari diadakannya kebijakan ini untuk menjadikan Euro sebagai mata uang tunggal di Uni Eropa<sup>3</sup>.

Penggunaan Euro sebagai mata uang tunggal di Eropa dianggap sebagai hasil kesuksesan European Economic and Monetary Union. Beberapa negara telah menempuh integrasi lebih lanjut dengan mengadopsi Euro sebagai mata uang negara tersebut kecuali Inggris dan Denmark. Inggris telah memilih keluar dari pengadopsian Euro sejak awal dengan memilih “option out”. Ketika euro pertama kali dinobatkan sebagai mata uang tunggal untuk Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair mengatakan bahwa harus

---

<sup>3</sup> Economic and Monetary Union,”[https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en) (diakses pada 15 Maret 2017)

ada “5 tahapan tes” yang harus dilalui negaranya hingga negaranya mau mengadopsi euro<sup>4</sup>.

Sebuah penciptaan mata uang tunggal berarti dimulainya kebijakan moneter yang terpusat di Eropa yang harus dijalankan oleh negara anggotanya. Kebijakan moneter akan diatur oleh sebuah bank sentral baru yaitu Bank Sentral Eropa. Bank ini nantinya yang mengatur kebijakan moneter luas khususnya, peraturan tentang suku bunga.<sup>5</sup> Negara anggota akan kehilangan kekuatannya untuk mengatur kebijakan moneter nasionalnya secara terpisah dan independen. Negara anggota harus menyerahkan kebijakan tersebut kepada Bank Sentral Eropa.

Pemerintah Inggris tidak ingin melepaskan kontrol kebijakan suku bunga negaranya ke Uni Eropa yang akan terjadi ketika suatu negara mengadopsi sistem Euro. Banyak yang berpendapat apabila Inggris bergabung dengan Euro, Inggris akan mendapatkan pengaruh ekonomi yang lebih mendalam diantara negara yang mengadopsi Euro. Akan tetapi Inggris akan menyerahkan terlalu banyak kedaulatan negaranya untuk mengatur mata uang negaranya. Harga yang dibayarkan Inggris dengan menyerahkan kekuasaan negaranya untuk mengatur sendiri mata uangnya tidak sepadan dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan Inggris apabila mengadopsi Euro. Jika Inggris bergabung untuk mengadopsi Euro, maka Inggris akan kehilangan

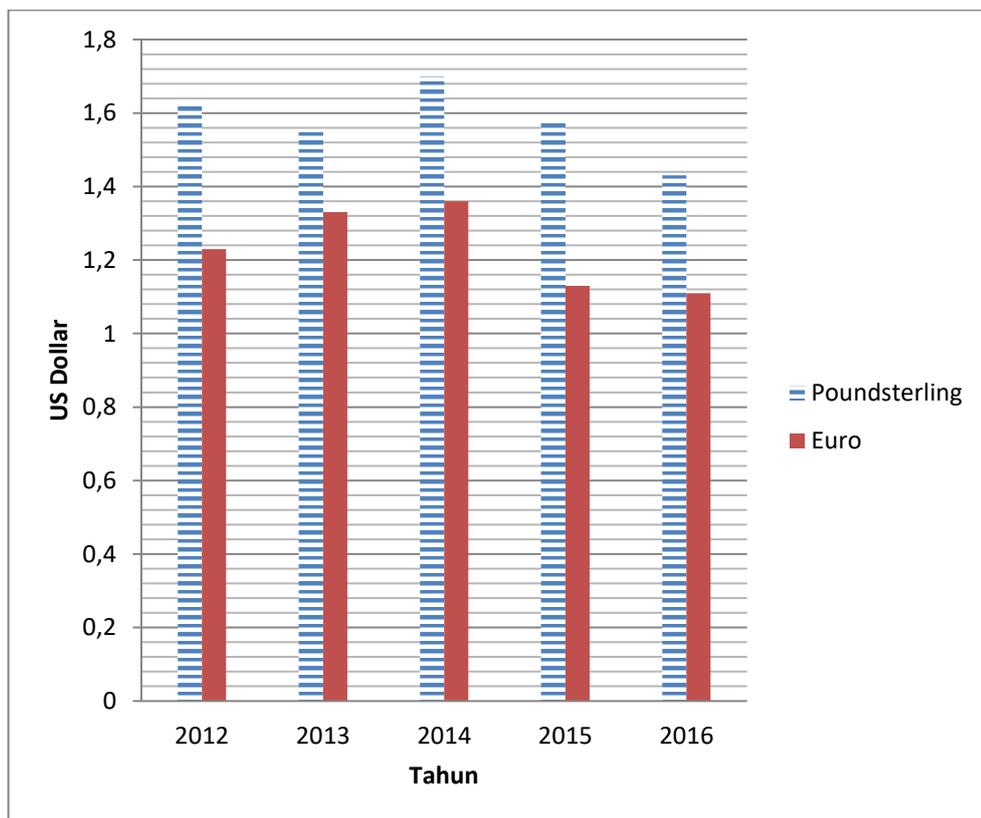
---

<sup>4</sup>Gerty Firlmna, "Why doesn't England use euro?," <http://www.investopedia.com/ask/answers/100314/why-doesnt-england-use-euro.asp> (akses pada 15 Maret 2017)

<sup>5</sup> Arowadi Lubis, "Integrasi Mata Uang Eropa", diakses dari <http://arowadi.blogspot.co.id/2013/09/integrasi-mata-uang-eropa.html> pada tanggal 15 Maret 2017

pengaruhnya mengurus urusan dalam negeri negaranya yang merupakan hal terpenting sebagai tolok ukur kedaulatan suatu negara<sup>6</sup>.

Diagram 4.2 Nilai Tukar Poundsterling dan Euro terhadap US Dollar



Sumber : <http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=USD&view=10Y> Diakses pada 9 Maret 2017

Sejak awal, nilai Euro lebih rendah terhadap nilai Poundsterling atau US Dollar. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016 nilai tukar Euro tidak lebih tinggi dari nilai tukar Poundsterling. Pada tahun 2012 1 Euro senilai 1,2 Dollar sedangkan 1 Poundsterling senilai 1,6 dollar. Euro terus berada dibawah Poundsterling. Sebelum referendum, di bulan juni 2016 1 Euro senilai 1,1 dollar sedangkan 1 poundsterling

<sup>6</sup>John Coles, "Euroseptical Reader : British influence and the Euro," *Palgrave Macmillan Journal* ,no 2 (Juni,2001),hal 8-9.

senilai dengan 1,43 dollar. Ditahun 2016, 1 Pounsterling senilai 1,15 Euro. Inggris lebih memilih untuk mempertahankan mata uangnya ( Pounsterling) yang nilainya lebih tinggi dari Euro.

Hubungan Inggris dengan Uni Eropa mencakup segala aspek domestik dan internasional. Sehingga keputusan Inggris terhadap Euro tidak akan disamakan dengan aspek aspek kerjasama yang lainnya. Selama ini masyarakat menganggap keberhasilan Inggris menjalin kerjasama dengan negara anggota lain di Uni Eropa tidak berhubungan dengan kebijakan mata uang tunggal ( Euro). Keberhasilan kerjasama ekonomi Inggris ditentukan oleh proses negosiasi, tawar menawar dengan badan ekonomi negara lain, dan kemampuan diplomatik pemerintah Inggris selama ini. Bukan karena Inggris mengadopsi Euro atau tidak. Selama ini Inggris tetap menjalankan ekonominya dengan baik tanpa mengadopsi Euro.<sup>7</sup>

Inggris akan lebih kuat jika dapat menjaga mata uang, aset, dan kebijakan ekonominya sendiri. Dengan tetap berada diluar zona Euro, Inggris terhindar dari transfer kekuasaan negaranya untuk mengambil keputusan. Sehingga Inggris dapat mempertahankan fungsi institusi negaranya (pemerintah dan parlemen) yang jelas jelas mengusung kepentingan nasional Inggris<sup>8</sup>.

## 2. Common Foreign and Security Policy

Common Foreign and Security Policy adalah kesepakatan kebijakan luar negeri anggota Uni Eropa yang mencakup isu keamanan dan aksi pertahanan berbentuk diplomasi atau tindakan. Berdasarkan pada Perjanjian Maastricht bab V pasal J.1

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal 10.

<sup>8</sup>*Ibid.* hal. 14

kesepakatan dalam kebijakan ini mengacu pada bagian tertentu dari hubungan luar negeri Uni Eropa. Kebijakan ini implementasi dari kebijakan luar negeri dan keamanan umum Uni Eropa yang mencakup semua bidang kebijakan hubungan luar negeri dan keamanan. Termasuk pada bidang perdagangan antar negara, kebijakan komersial, pendanaan untuk negara ketiga, dll. CFSP memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan luar negeri negara negara anggota.

Badan yang berwenang dalam memimpin proses kebijakan ini adalah *High Representative for the Union for Foreign Affairs and Security Policy* yang dibentuk saat perjanjian Lisbon dibuat pada bulan desember 2009. *High Representative* mewakili Dewan Eropa menjadi badan yang berkuasa dalam mengartikulasikan kebijakan luar negeri yang telah disepakati. Proses pengambilan keputusan *Common Foreign and Security Policy* membutuhkan suara bulat 28 negara anggota Uni Eropa. Setelah disetujui, aspek aspek tertentu dapat ditentukan lebih lanjut oleh suara mayoritas yang memenuhi syarat.

Seiring berjalannya waktu, implementasi kebijakan ini tidak se-sederhana itu. *High Representative* semakin mempunyai kekuatan untuk memutuskan, menentukan, dan melaksanakan kebijakan luar negeri dan keamanan umum yang mencakup kepentingan nasional semua anggota. Inggris menganggap kebijakan ini semakin mencampuri urusan luar negeri suatu negara, yang tidak memerlukan campur tangan negara anggota lain dalam memutuskan hal tersebut. Masing-masing negara mempertahankan kedaulatan dan kebijakan luar negeri mereka. Begitu pula Inggris, yang tidak ingin kehilangan kekuatan ( kedaulatan ) mereka atas kebijakan luar negeri mereka seutuhnya. Inggris tidak ingin kebijakannya

terhambat oleh prosedur yang kompleks dan dirasa tidak diperlukan. Pemerintah Inggris merasa lebih baik mempunyai kekuasaan atas urusan luar negrinya sendiri daripada harus menyerahkan kekuasaan atas kebijakan tersebut ke Pusat pemerintahan Uni Eropa yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional Inggris.

Hal yang terkait dengan kebijakan luar negeri Inggris dirasa sangat vital bagi Inggris. Karena aset, kepentingan, dan pengaruh Inggris tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa yang lain, hubungan kerjasama Inggris yang paling menyebar ke wilayah negara lain terutama Amerika Serikat, Asia, Middle East, Afrika.<sup>9</sup>

### 3. Open Border Policy

Selain kebijakan mata uang tunggal, Inggris juga tidak sejalan dengan kebijakan open border policy yang dibuat oleh Uni Eropa. Di Uni Eropa, kebijakan ini dikenal dengan *Schengen Agreement* yang dibuat pada tahun 1985. Ditandatangani pada tanggal 14 Juni tahun 1985, dekat kota Schengen, Luksemburg, dengan lima dari sepuluh negara anggota Uni Eropa (Belgia, Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Belanda). Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghapus secara bertahap pemeriksaan internal di perbatasan. Schengen Area mewakili wilayah teritorial yang menjamin pergerakan bebas orang-orang yang termasuk dalam wilayah negara anggota perjanjian tersebut. Negara yang menandatangani perjanjian tersebut menghapuskan semua batas-batas internal sebagai pengganti dari

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 16

kebebasan eksternal tunggal. Kebebasan tersebut berkaitan dengan visa, permintaan suaka, kontrol perbatasan dan juga kontrol keamanan wilayah Schengen Area.<sup>10</sup>

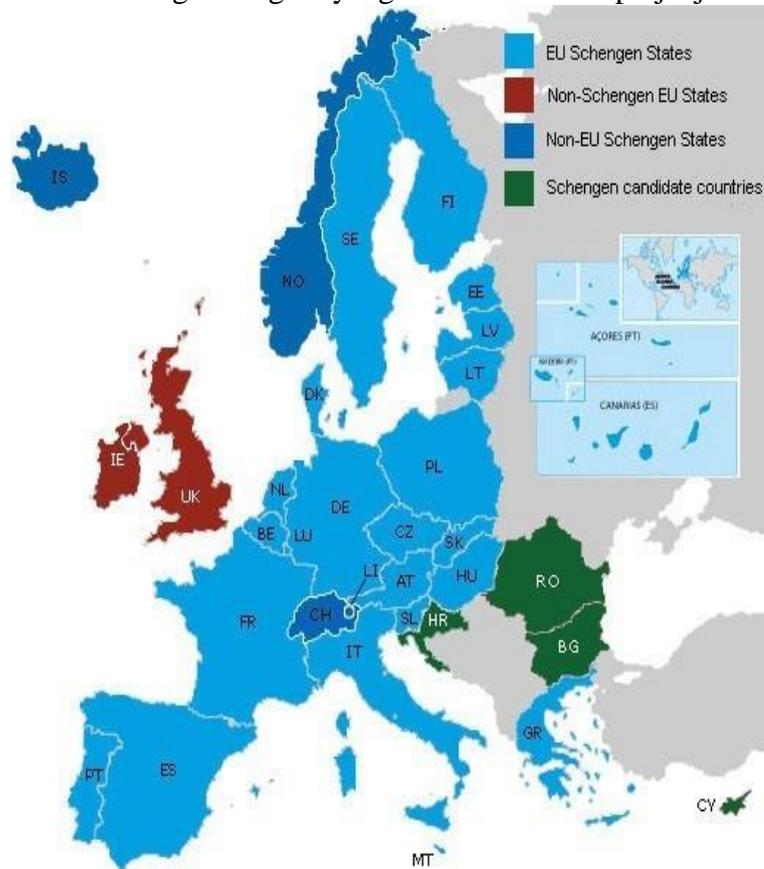
Awalnya, perjanjian Schengen dibuat secara independen antar negara-negara wilayah Eropa. Namun pada tahun 1999 perjanjian ini dimasukkan dalam hukum Uni Eropa dengan Perjanjian Amsterdam. Tidak semua negara menandatangani. Negara anggota pertama yang mengadopsi perjanjian tersebut adalah Belgia, Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Belanda.<sup>11</sup> Beberapa negara lain menyusul setelahnya secara bertahap sehingga mencakup hampir seluruh negara anggota.

---

<sup>10</sup>EU Law and Publication, (Agustus, 2015), diakses dari <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A133020> pada tanggal 16 Maret 2017

<sup>11</sup>Feergus O'Sullivan, "European Union's open border", CityLab, diakses dari <http://www.citylab.com/politics/2016/02/european-union-open-border-belgium-checks-syrian-refugee-isis/470733/> pada tanggal 2 April 2017

Gambar 4.2 Negara-negara yang termasuk dalam perjanjian Schengen



Sumber : [livinggreece.gr/2007/07/09/schengen-countries/](http://livinggreece.gr/2007/07/09/schengen-countries/) diakses pada 17 Maret 2017

Gambar diatas adalah gambar wilayah negara yang tergabung dalam Schengen Area. Negara dengan warna biru muda merupakan negara-negara anggota Uni Eropa yang tergabung dalam Schengen Area. Selain anggota Uni Eropa, beberapa negara sekitar yang tidak termasuk negara Uni Eropa juga dapat berpartisipasi dalam Schengen Area dengan ditunjukkan dengan warna biru tua. Sedangkan warna hijau menunjukkan beberapa negara kandidat yang tergabung dalam Schengen Countries yaitu Romania, Bulgaria, dan Hungary. Negara anggota Uni Eropa yang tidak tergabung dalam Schengen area hanya Inggris dan Irlandia yang ditunjukkan dengan warna merah.

Dari lima negara pertama yang menandatangani Schengen Area (Belgia, Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Belanda ) beberapa negara lain kemudian menyusul. Italia menandatangani perjanjian pada tanggal 27 November 1990, Spanyol dan Portugal bergabung pada 25 Juni 1991, diikuti Yunani pada tanggal 6 November 1992, dilanjutkan Austria pada tanggal 28 April 1995 dan Denmark, Finlandia dan Swedia pada tanggal 19 Desember 1996. Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia dan Slovakia bergabung pada tanggal 21 Desember 2007 dan Swiss pada tanggal 12 Desember 2008. Hingga saat ini total 30 negara yang bergabung meliputi 26 anggota Uni Eropa (kecuali Inggris dan Irlandia ) dan beberapa non- anggota Uni Eropa.<sup>12</sup> Uni Eropa sekarang menjadikan perjanjian Schengen menjadi bagian inti dari hukum Uni Eropa dan harus dijalankan oleh semua negara anggota Uni Eropa tanpa ada pilihan “opt-out”.

Lain dengan beberapa negara di Uni Eropa yang pada akhirnya bergabung dengan Schuman Area, hanya Inggris dan Irlandia yang masih menyatakan ketidaksetujuan mereka. Inggris dan Irlandia lebih memilih untuk mengadakan perjanjian area Common Travel Area diantara keduanya. Hal ini dikarenakan Irlandia dan Irlandia Utara berbagi satu daratan wilayah<sup>13</sup>. Sehingga dengan Common Travel Area, Inggris dan Irlandia membebaskan pergerakan orang dan jasa di kedua wilayah negara tanpa memerlukan pemeriksaan dokumen identitas

---

<sup>12</sup>O’Sullivan,*Loc. Cit.*

<sup>13</sup>Steve Peers, “The UK and The Schengen System,” KING’s College London Analysis, 3 Desember, 2015, hal 2.

Sejak awal diperkenalkan, Inggris memilih “opt-out” dalam perjanjian Schengen. Sehingga orang-orang yang melewati perbatasan Inggris masih akan tetap diperiksa. Meskipun begitu, Inggris ikut berkoordinasi dengan sistem Sistem Informasi Schengen (SIS). SIS adalah database canggih yang digunakan oleh pihak berwenang dari negara-negara anggota Schengen Area untuk bertukar data orang dan barang pada kategori tertentu. SIS ditujukan untuk kantor polisi dan petugas keamanan terkait untuk bertukar data tentang buronan, database orang, dan pencurian barang antara negara-negara anggota Schengen termasuk Inggris.<sup>14</sup>

Menurut data dari Fullfact.org tahun 2015 sekitar 3,2 miliar orang yang tinggal di Inggris adalah imigran Eropa. Sekitar 5% dari populasi Inggris. Dari angka 3,2 miliar orang tersebut, sekitar 2,3 miliar imigran yang bekerja atau untuk tujuan bekerja. Inggris menjadi penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman yang mempunyai 9,3% imigran dari total seluruh imigran Eropa. Sebanyak 5,23 juta imigran diprediksi membanjiri Inggris sampai tahun 2030.<sup>15</sup>

Kebijakan Open Border Policy Uni Eropa yang mengharuskan para anggotanya berbagi beban mengatasi pengungsi yang mengalir ke daratan Eropa sebagai akibat dari krisis Suriah. Secara otomatis memaksa Inggris untuk membuka pintu guna menampung pengungsi tersebut. Hal utama yang diterapkan dari Perjanjian Schengen adalah menghapuskan pemeriksaan perbatasan di antara negara-negara yang berpartisipasi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk

---

<sup>14</sup>Feergus O’Sullivan, *Loc.Cit.*,

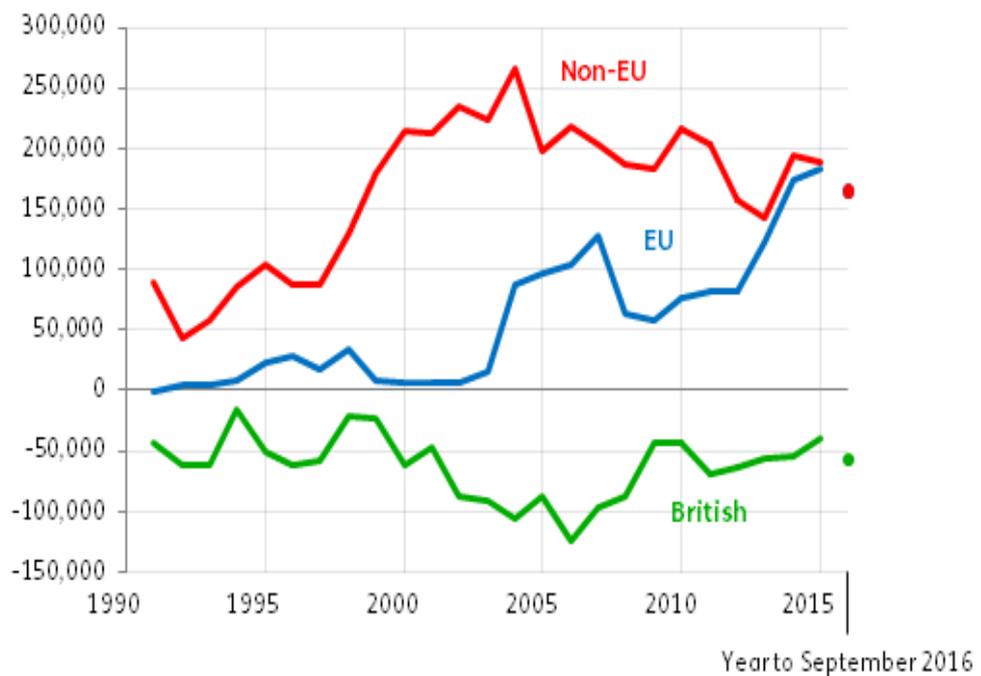
<sup>15</sup>EU Immigration to the UK”, Fullfact.org, diakses dari <https://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/> pada tanggal 1 April 2017

mempermudah dan mempercepat pergerakan orang dan jasa. Inggris dapat memilih untuk tidak bergabung dengan sistem Schengen dan memilih status “opt-out” dengan merujuk pada aturan protocol di perjanjian Amsterdam.<sup>16</sup>

Grafik 4.1 Data Imigran di Inggris dari tahun 1990 sampai 2015

## Migration by nationality

Long-term international net migration in the UK by nationality



\*Figures from 2001-2011 no longer accurate due to revisions, but no alternative available

Source: ONS Long-Term International Migration 2014, table 2.01a and Migration Statistics Quarterly Report, February 2017, table 1



Sumber: <https://fullfact.org/immigration/eu-migration-and-uk/> diakses pada tanggal 21 Maret 2017

<sup>16</sup>Steve Peers, *Loc. Cit.*

Grafik diatas adalah data imigran yang masuk ke Inggris dari tahun 1990 hingga 2015. Tidak hanya imigran dari negara anggota Uni Eropa saja, imigran juga kebanyakan berasal dari luar negara anggota Uni Eropa. Bahkan imigran non-EU berjumlah lebih banyak dari imigran anggota EU. Dari tahun 1995 imigran Uni Eropa terus mengalami peningkatan. Lonjakan imigran tertinggi terjadi pada tahun 2013 hingga 2015 sebagai imbas dari open border policy.

Terhitung selama 12 bulan sebelum September 2016, sebanyak 268.000 warga negara anggota Uni Eropa lain bermigrasi ke Inggris. Sebanyak 103.000 warga negara Inggris bermigrasi keluar. Jadi, “ net immigration’ Inggris adalah 165.000 . “Net Immigration” adalah jumlah yang didapatkan dari selisih jumlah imigran dan emigran di suatu negara. Jumlah yang sangat tinggi menurut Inggris, dibandingkan dengan negara negara lain di Uni Eropa. Menurut data dari Migration Statistic Quarterly Report, selain imigran dari negara anggota Uni Eropa, terdapat lebih banyak imigran yang berasal dari negara negara diluar anggota Uni Eropa yang datang ke Inggris. Imigran dari luar Uni Eropa lebih banyak masuk ke Inggris. Lonjakan imigran Uni Eropa terbesar terjadi pada tahun 2010 akhir hingga 2015 awal.<sup>17</sup>

Dilihat dari data imigran di beberapa negara di Uni Eropa, Jerman merupakan negara dengan jumlah imigran tertinggi di Uni Eropa. Inggris berada nomer tiga setelah Jerman dan Belanda. Berdasarkan data dari *European Statistic*

---

<sup>17</sup>Office for National Statistic, “Migration Statistics Quaterly Report, diakses dari”<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/feb2017> pada 1 April 2017

*Explained* di website resminya, di tahun 2015 Jerman menampung sebanyak 1.543.8ribu jiwa imigran. Belanda menampung 166.9 ribu jiwa, sedangkan Inggris berada di peringkat tiga dengan menampung 631.5 ribu jiwa ditahun 2015.<sup>18</sup> Dengan banyaknya jumlah imigran yang masuk ke Inggris di setiap tahunnya, pelaksanaan kebijakan open border policy Uni Eropa akan menambah daftar orang-orang yang masuk ke Inggris secara bebas. Kebijakan tersebut yang memaksa Inggris menampung imigran dari anggota Uni Eropa maupun diluar anggota Uni Eropa pada saat terjadi krisis imigran Suriah.

Konsekuensi dari pilihan *option-out* Inggris dari Schengen Area, Inggris masih bisa menentukan orang-orang yang berhak masuk Inggris atau tidak dengan memeriksa orang-orang yang datang dari seluruh Uni Eropa. Inggris tetap mengakui dan melindungi warga anggota Uni Eropa lain dan anggota keluarga mereka sesuai dengan aturan Uni Eropa terkait dengan kebebasan pergerakan orang. Namun, masuk keluarnya warga lain ke atau keluar dari Inggris dikendalikan oleh hukum Inggris.<sup>19</sup> Yang berarti, Inggris masih memiliki kekuatan ekstra untuk menguasai dan mengontrol perbatasan negaranya sendiri.

Sebagai negara anggota Uni Eropa, Inggris harus mengikuti aturan yang telah disepakati di tubuh Uni Eropa. Akan tetapi pada kenyataannya, beberapa kebijakan Uni Eropa seringkali tidak disetujui oleh Inggris. Secara tidak langsung, beberapa kebijakan Uni Eropa diatas menimbulkan ketegangan hubungan antara

---

<sup>18</sup>European Statistic Explained : Immigration by citizenship 2015,” diakses dari [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigration\\_by\\_citizenship\\_2015\\_\(%C2%B9\).png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigration_by_citizenship_2015_(%C2%B9).png) pada tanggal 25 April 2017

<sup>19</sup>Steve Peers,*Loc. Cit.*

Inggris dan Uni Eropa. Eurozone, Common Foreign and Security Policy, dan Schengen Area merupakan kebijakan Uni Eropa yang paling ditentang oleh Inggris. Sebelum diadakan referendum, Inggris telah berusaha mencoba menegosiasikan kembali posisinya dalam beberapa kebijakan Uni Eropa diwakilkan oleh Perdana Menteri David Cameron. Akan tetapi negosiasi tersebut tidak berjalan dengan sukses yang berakhir dengan diadakannya referendum *Brexit*.

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Inggris mempunyai kepentingan nasional negaranya yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan pengambilan keputusan luar negerinya. Terkait dengan hubungan Inggris sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, hubungan keduanya tidak selalu berjalan dengan baik. Walaupun Inggris banyak diuntungkan dari segi ekonomi, tercatat beberapa kali Inggris menyatakan keberatan terhadap kebijakan Uni Eropa karena dianggap terlalu memberikan kekuasaan bagi Uni Eropa dan juga merugikan Inggris. Inggris dipahami sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan nasionalnya. Semakin terintegrasinya Uni Eropa, segala hal terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial negara anggotanya diatur oleh lembaga institusional Uni Eropa. Semakin terintegrasinya Uni Eropa semakin membuat Inggris kehilangan kedaulatan negaranya untuk mengatur negaranya sendiri.